



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI
KE PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
DI PROVINSI BANTEN
PADA MASA RESES PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2020 – 2021**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

2021

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Pasal 67 dan 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, diatur bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi, yakni Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut, dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan kunjungan kerja, baik di dalam maupun ke luar negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UU MD3.

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Provinsi Banten didasarkan pada aturan pada undang-undang tersebut. Selain itu, pelaksanaan kunjungan ini juga didasarkan pada Keputusan Pimpinan DPR RI tentang Penugasan Anggota Komisi I s.d. XI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020 – 2021, dan Keputusan Rapat Internal Komisi VI DPR RI mengenai Sasaran dan Objek Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020–2021.

B. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI

NO.	NO. ANGGOTA	N A M A	KETERANGAN
1	A-352	MARTIN MANURUNG, SE, MA	PIMP. F. NASDEM / KETUA TIM
2	A-33	FAISOL RIZA, SS	PIMP. F. PKB
3	A-161	DARMADI DURIANTO	F. PDIP
4	A-170	RIEKE DIAH PITALOKA	F. PDIP
5	A-229	ST. ANANTA WAHANA., SH, MH	F. PDIP
6	A-251	Ir. DEDDY YEFRI HANTERU SITORUS, MA	F. PDIP
7	A-209	SONNY T. DANAPARAMITA	F. PDIP
8	A-305	H. SINGGIH JANURATMOKO, SKH, MM	F. PG
9	A-311	DONI AKBAR, SE	F. PG
10	A-348	TRIFENA M. TINAL, B.Sc	F. PG
11	A-94	MUHAMMAD HUSEIN FADHLULLOH, B.BUS, MM, MBA	F. GERINDRA
12	A-362	Drs. NYAT KADIR	F. NASDEM
13	A-396	MUHAMMAD RAPSEL ALI	F. NASDEM
14	A-21	Drs. H. MOHAMAD TOHA S.Sos., M.Si.	F. PKB
15	A-544	DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.	F. PD
16	A-572	MUHAMMAD DHEVY BIJAK	F. PD

17	A-554	EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc.	F. PD
18	A-433	H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos.	F. PKS
19	A-506	ABDUL HAKIM BAFAGIH	F. PAN
20	A-500	DAENG MUHAMMAD, SE, M.Si.	F. PAN
21	--	DEWI RESMINI, SE, M.Si.	SETKOM VI DPR RI
22	--	RINA SARTIKA PAMELA, S.T, M.H.	SETKOM VI DPR RI
23	--	DEVI RISNAYANTI, S.E.	SETKOM VI DPR RI
24	--	DWI PONCO KUNCORO	SETKOM VI DPR RI
25	--	MUHAMMAD DARWINSYAH, SE, MM	TENAGA AHLI KOMISI VI DPR RI
26	--	RUNISAN BUDIATI	MEDIA CETAK DAN SOSIAL
27	--	AMMYTA PRADITA WARDANINGRUM	TV PARLEMEN
28	--	DIDI SUPRIADI	PENGEMUDI

II. INFORMASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA

Kartu Tani adalah kartu yang diluncurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian, yang fungsinya sebagai pembayaran pupuk bersubsidi dan aplikasi sistem informasi pertanian Indonesia. Pemerintah bekerjasama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. membuat Kartu Tani yang akan memudahkan petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

Kartu Tani ini sebenarnya adalah kartu debit BRI *co-branding* yang digunakan untuk membaca alokasi pupuk bersubsidi dan transaksi pembayarannya melalui mesin *Electronic Data Capture* (EDC) BRI yang ditempatkan di pengecer. Kartu Tani ini juga berfungsi untuk melakukan seluruh aktivitas transaksi lainnya.

Maksud dari pembuatan Kartu Tani ini adalah terwujudnya pendistribusian, pengendalian, serta pengawasan pupuk bersubsidi kepada petani yang berhak menerimanya. Distribusi pupuk bersubsidi dari pemerintah harapannya bisa sesuai dengan asas enam tepat; tepat harga, mutu, tempat, jenis, jumlah, dan waktu.

Adanya Kartu Tani ini juga akan mendorong budaya menabung di kalangan petani. Ini karena Kartu Tani tidak hanya untuk membeli pupuk bersubsidi, tetapi juga bisa digunakan untuk menabung. Kelebihan lain dari Kartu Tani untuk menabung dan transaksi pupuk bersubsidi adalah biaya simpannya yang lebih ringan.

Fungsi utama dari Kartu Tani ini adalah untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Oleh karena itu harus diketahui bagaimana mekanisme pembelian pupuk bersubsidi dengan Kartu Tani. Yang pertama, petani harus membawa kartu tani ke kios pupuk yang ditunjuk. Kemudian kartu tani digesek pada mesin EDC dan nomor pin dimasukkan. Selanjutnya, mesin EDC akan menampilkan informasi data alokasi pupuk dan petani. Para petani bisa melakukan pembelian pupuk sesuai dengan kebutuhan.

Setelah selesai dengan pembelian pupuk, petani bisa cek kembali alokasi sisa kuota pupuk. Pengecer akan memberikan jumlah pupuk yang dibeli. Setelah semua transaksi selesai, petani bisa pulang dan memanfaatkan pupuk dengan sebaik mungkin.

Adapun manfaat dari Kartu Tani ini untuk para Stakeholder adalah :

Untuk Petani :

- Kepastian Pupuk Subsidi
- Menumbuhkan Kebiasaan Menabung
- Kemudahan mendapatkan bantuan/subsidi lainnya karena data petani sudah terdapat di *database*
- Inklusi dan Literasi Keuangan

Untuk Kios Pupuk Lengkap (PKL) :

- Dana hasil pembelian pupuk subsidi dari petani dapat langsung masuk ke rekening simpanan KPL
- Kemudahan pencatatan penjualan pupuk
- Mendapatkan penghasilan tambahan sebagai Agen Laku Pandai

Untuk Pemerintah :

- Ketersediaan data petani *by name by address*
- Tepat sasaran penyaluran pupuk subsidi
- Kemudahan *monitoring* dan evaluasi kegiatan pertanian Indonesia

Untuk Produsen Pupuk :

- Informasi Kebutuhan Pupuk Subsidi beserta sebaran wilayahnya
- Distribusi pupuk lebih akurat dan tepat sasaran
- Mempermudah manajemen *stock* dan perkiraan produksi pupuk subsidi

Sementara itu, selama tahun 2020 tercatat sebanyak 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten telah melakukan pembelian pupuk subsidi menggunakan Kartu Tani dengan total realisasi sebanyak 381 ribu Kg Pupuk senilai Rp 678 Juta.

Adapun berikut Progress Kartu Tani di Provinsi Banten :

1. Sebanyak 296.875 Kartu Tani yang sudah tercetak
2. Sebanyak 217.318 (73%) Kartu Tani yang terbagi
3. Sebanyak 1.459 (0.7 %) Kartu Tani yang digunakan
4. Sebanyak 446 Kios Pupuk Lengkap (KPL) yang sudah beroperasi
5. Sebanyak 314 (70 %) Mesin EDC yang terpasang

Dari Progress di atas, berikut data transaksi Kartu Tani di Provinsi Banten :

1. Sebanyak 2.796 jumlah transaksi
2. Sebesar 381.289 (Kg) Pupuk Subsidi yang sudah terrealisasi
3. Dengan nominal sebesar 678 Juta Rupiah

III. CATATAN DAN REKOMENDASI

Dari pertemuan yang dilakukan kepada jajaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada saat pelaksanaan kunjungan kerja spesifik ini, ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian mitra. Catatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- Terkait realisasi dan implementasi Kartu Tani, hasilnya di lapangan masih sangat minim. Bahkan di Provinsi Banten belum mencapai 1 persen realisasinya. Padahal Program Kartu Tani ini sudah ada sejak tahun 2017. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk harus lebih meningkatkan lagi sosialisasi terkait Program Kartu Tani ini, serta melakukan sinergitas dengan Kementerian Pertanian, Pemerintah daerah, PT Pupuk Indonesia, Himbara, dan pihak terkait lainnya.
- Perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang lebih baik lagi antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Kementerian Pertanian terkait sosialisasi Program Kartu Tani dan pendataan petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi melalui Kartu Tani.
- Kinerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk agar lebih fokus melayani masyarakat, mengingat ada beberapa tanggung jawab besar diluar Program Kartu Tani, seperti KUR dan BPUM.

Dari berbagai data dan informasi, serta catatan yang diperoleh pada saat pelaksanaan kunjungan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Komisi VI DPR RI, antara lain:

1. Komisi VI DPR RI perlu menyampaikan berbagai catatan yang telah diperoleh selama kunjungan untuk disampaikan kepada Kementerian Pertanian dan Perusahaan BUMN terkait agar dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya terkait Program Kartu Tani.

2. Komisi VI DPR RI melihat dan menilai Program Kartu Tani belum maksimal untuk menjadi sebuah solusi dalam hal distribusi Pupuk Subsidi kepada masyarakat, khususnya petani. Oleh karena itu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam hal sosialisasi dan sinergi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari Program Kartu Tani tersebut.
3. Komisi VI DPR RI perlu menyampaikan dan meminta kepada Kementerian BUMN dan Pemerintah agar BUMN yang mendapat penugasan PSO (subsidi) dan Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan penguatan sosialisasi dalam rangka mengurangi persepsi yang salah di masyarakat terkait berbagai aturan atau regulasi terkait pelaksanaan pupuk subsidi.
4. Komisi VI DPR RI akan menyampaikan dan meminta Kementerian BUMN untuk melakukan perbaikan kebijakan subsidi baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi (termasuk jenis subsidi dan sistem distribusi) agar mampu memberikan dampak yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kesehatan dan kinerja operasional BUMN yang ditugaskan oleh Pemerintah.

IV. DOKUMENTASI KEGIATAN





V. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Provinsi Banten, pada masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh dalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VI DPR RI.

Jakarta, 25 Januari 2021
Ketua Tim Kunker Komisi VI DPR RI
Ke Provinsi Banten

TTD

MARTIN MANURUNG, SE, MA

A – 352